



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**



MANOKWARI, JANUARI 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022.

Seiring dengan terlaksananya program kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat di Tahun Anggaran 2022, maka sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaannya perlu adanya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BNNP Papua Barat. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hasil capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran dan indeks capaian kegiatan selama satu tahun.

Dengan tersusunnya LKIP BNN Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dalam memerangi Narkoba dan dapat mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) khususnya di Provinsi Papua Barat.

Manokwari, 28 Maret 2023
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Papua Barat



(Handwritten signature)
Heri Istu Hariono, S.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Program Kerja	5
B. Rencana Kerja Tahunan	7
C. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Analisa Capaian Kinerja	11
B. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 sebagai tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan, dan Bidang Hukum dan Kerjasama. Melalui kelima Bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. BNNP Papua Barat sebagai unit kerja dari BNN yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berwajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam lampiran ini.

BNNP Papua Barat dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun Anggaran 2022 memiliki sasaran strategis **“Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan**

Peredaran Gelap Narkoba Secara Efektif di Provinsi Papua Barat”, dengan 11 (dua belas) sasaran kegiatan (I s/d XI), yang diukur dengan 15 Indikator Kinerja Kegiatan (1 s/d 15) sebagai berikut :

- I. Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 1. Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi;
- II. Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 2. Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi;
- III. Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN;
 3. Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi;
- IV. Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan;
 4. Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”;
 5. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diIntervensi;
- V. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi;
 6. Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih;
 7. Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis;
- VI. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika;
 8. Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi;
 9. Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi;
- VII. Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi;

10. Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat;
- VIII. Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya;
 11. Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21;
- IX. Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika;
 12. Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan;
 13. Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika;
- X. Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien;
 14. Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat;
- XI. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur;
 15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat.

Faktor geografis Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang begitu sulit dijangkau antar Kabupaten/Kota menjadi salah satu kendala yang berkelanjutan dari tahun ke tahun dalam pelaksanaan kegiatan P4GN. Transportasi darat yang dapat digunakan hanya ke Kabupaten Manokwari Selatan sedangkan daerah lain melewati darat memerlukan usaha lebih karena kondisi jalan dan keamanan. Kemudian untuk menjangkau daerah lain hanya dapat menggunakan pesawat dan kapal laut. Sehingga dalam menerapkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memerlukan upaya yang lebih keras lagi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Permasalahan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia di BNNP Papua Barat, Secara keseluruhan jumlah pegawai di BNNP Papua Barat berjumlah 24 pegawai hal ini masih jauh dari jumlah pegawai ideal pada tingkat BNNP sesuai Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/888/XI/KA/KP.07.00/2022/BNN tentang Daftar Nama, Kelas, dan Formasi Jabatan Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dimana di setiap BNNP seharusnya memiliki 153 pegawai.

Beberapa langkah yang telah di tempuh BNNP Papua Barat dalam menghadapi kendala tersebut diatas adalah untuk permasalahan personil staf pelaksana maupun pejabat BNNP Papua Barat telah meminta kepada Biro Kepegawaian BNN, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Polda Papua Barat agar diberikan penambahan personil.

Dari segi sarana dan prasarana BNNP Papua Barat belum memiliki gedung kantor sendiri, sehingga masih harus menyewa ruko dengan biaya yang mahal. Untuk mengatasi hal ini BNNP Papua Barat untuk jangka panjang sedang melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memberi hibah berupa tanah untuk pembangunan Gedung kantor BNNP Papua Barat, kemudian untuk jangka pendek BNNP Papua Barat sedang berupaya melakukan pendekatan kepada instansi lain baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman gedung sementara yang akan digunakan sebagai kantor BNNP Papua Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang BNN di daerah maka dibentuk BNN Provinsi yang berkedudukan di ibukota Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dibentuk 34 BNN Provinsi dan salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat. Selanjutnya Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tersebut diubah terakhir dengan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pemerintah serta Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, BNNP Papua Barat selaku entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja yaitu unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja memiliki kewajiban laporan kinerja.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2021;
6. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 8 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Papua Barat, yang berkedudukan di Manokwari, Papua Barat.

- b. BNNP Papua Barat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dan dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas

Tugas BNNP Papua Barat yaitu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Papua Barat.

3. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

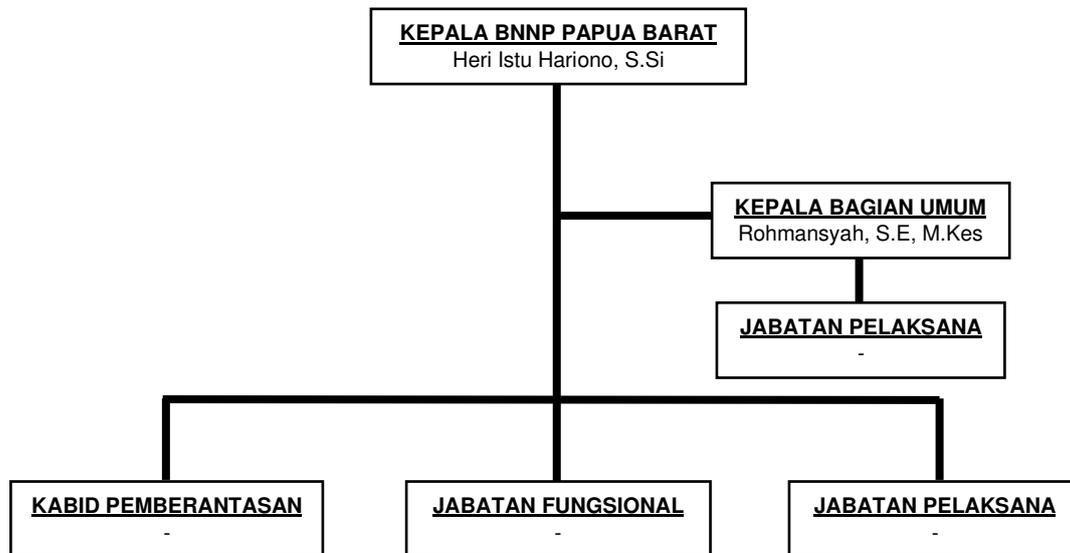
4. Kewenangan

Kewenangan BNNP secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNNP berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

D. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di BNNP Papua Barat sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat



E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNNP Jawa Tengah, antara lain Gambaran Umum, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

BAB II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan tentang Rencana Strategis/Rencana Program Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas tentang penetapan kinerja tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan analisis pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, Permasalahan dan Rekomendasi.

BAB IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Program Kerja

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi 2020-2024 yang mengacu pada visi misi pembangunan sosial **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong**, serta mengacu pada Nawacita Presiden sejalan dengan visi BNN yaitu “terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba”. Dengan poin-poin misi, antara lain :

- a. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Professional;
- b. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba;
- c. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan, *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Disisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Kontruksi relasional dan substantif dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarah pada tujuan BNN tahun 2020-2024, yaitu **Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba** dan **Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas**. Berikut Rencana Program Kerja BNNP Papua Barat Tahun 2020-2024 :

Tabel 2.1 Rencana Program Kerja BNNP Papua Barat Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	7	1	1	1	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	3	5	5	5	5
3	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	8	4	2	2	2
4	Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkotika Secara Berkelanjutan	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”	1	1	1	1	1
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diIntervensi	-	2.5	2.5	2.5	2.5
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	-	5	10	10	10
		Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	-	10	25	25	25
6	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2	3	2	2	2
		Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	1	1	1	1	1
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	-	3,2	3,2	3,2	3,2
8	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	7	5	5	5	5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100	100	100	100
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100	100	100	100
10	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	88	90	92	94	96
11	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	-	94	96	97	99

B. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kinerja BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2022 terdiri dari 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P4GN). Adapun rincian kegiatan dan anggarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan Program Dukungan Manajemen

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	a.Layanan Perkantoran	12 Bulan	1,362,564,000
		b.Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	26,762,000
2	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	a.Layanan Manajemen SDM	45 Orang	37,062,000
3	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	a.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	6.040.000
4	Penyelenggaraan Tatasahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	a.Layanan Umum	1 Layanan	360,185,000
		b.Layanan Perkantoran	12 Bulan	2,080,289,000
		c.Layanan Sarana Internal	4 Unit	50,139,000
5	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	a.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	39,000,000

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P4GN)

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Penyelenggaraan Advokasi	a. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga	40,000,000
		b. Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	2 Desa	57,385,000
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	a. Fasilitasi Program Alternatif Development Pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1 Kelompok Masyarakat	122,122,000
3	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	a. Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1 Laporan	75,000,000
4	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	a. Data dan Pelaporan Klien Rehabilitasi	1 Laporan	40,978,000
5	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	a. Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga	204,980,000
6	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	a. Layanan Assesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	15 Orang	54,775,000
		b. Layanan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	2 Produk	50,500,000
		c. Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotikadan TPPU	5 Orang	72,020,000
7	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	a. Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	10 Orang	10,210,000

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		b. Tanaga Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kompetensi Teknis	25 Orang	208,275,000
8	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	a. Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	30 Orang	42,390,000
		b. Layanan IBM	10 Orang	11,769,000
		c. Layanan SKHPN	600 Orang	139,200,000
		d. Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-A	3 Orang	600,000
		e. Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-B	3 Orang	840,000
		f. Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2 Lembaga	41,189,000
		g. Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi di BNNK/Kota	1 Lembaga	9,533,000
		h. Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Terbentuk	1 Lembaga	17,580,000
9	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	a. Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	5 Perkara	446,400,000
10	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	a. SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Softskill	1 Lembaga	60,500,000

C. Perjanjian Kinerja

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua Barat telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2022 dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berkategori "tinggi" di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diIntervensi	2,5 Indeks
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang
		Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	10 Orang
6	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1 Lembaga
		Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	1 Unit
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	3,2 Indeks
8	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	7 Berkas Perkara
9	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100 Indeks
10	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	88 Indeks
11	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	95 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 di lingkup BNN Provinsi Papua Barat telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian realisasi perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian perjanjian kinerja BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Data capaian kinerja BNNP Papua Barat 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/ Kota	1 Kabupaten/ Kota
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/ Kota	1 Kabupaten/ Kota
3	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/ Kota	1 Kabupaten/ Kota
4	Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”	1 Kawasan	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	2,5 Indeks	2,46 Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang	10 Orang
		Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	10 Orang	10 Orang
6	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga
		Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	1 Unit	1 Unit
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	3,2 Indeks	3,67 Indeks
8	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	7 Berkas Perkara	8 Berkas Perkara
9	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks	100 Indeks
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100 Indeks	100 Indeks
10	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	88 Indeks	69,46 Indeks
11	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	95 Indeks	96,77 Indeks

Berdasarkan perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 maka realisasi pencapaian kinerja selama tahun 2022 untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi

Sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelatihan Sofskill kepada SMP/SMU untuk memperoleh Pengembangan Soft Skill Kepada Guru dan Siswa di SMK Negeri 1 Kota Sorong melalui media konvensional yaitu melalui Dialog Interaktif dan Penyelenggaraan Informasi Edukasi pada berbagai media seperti Media Online, Media Luar Ruang serta Media Cetak.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) Kabupaten/Kota dan capaian 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	100%

Definisi operasional dari indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. Pengukuran menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan

terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan pengisian Kuisioner. Pengukuran ini dilakukan secara nasional yang perhitungannya dilakukan terpusat melalui aplikasi www.dektari.bnn.go.id. Berdasarkan Surat Deputi Pencegahan Nomor : B/3960/XI/DE/PC.00.01/2022/BNN tanggal 30 November 2022 perihal : Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2022, BNNP Papua Barat memperoleh Indeks sebesar 50,25 untuk Tahun 2022 dengan kategori tinggi, dimana BNNP Papua Barat mengalami peningkatan indeks dari Tahun 2021 sebesar 49,54.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capaian Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi selaras dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 1 Kabupaten/Kota.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan tercapainya target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi dikarenakan kegiatan informasi dan edukasi telah terlaksana secara optimal dengan hasil evaluasi kegiatan dengan capaian baik melalui kegiatan antara lain :

- 1) Koordinasi Persiapan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU Sederajat;
- 2) Pelatihan Softskill di SMP dan SMU Sederajat;
- 3) Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha mempertahankan serta meningkatkan capaian Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyebarluaskan informasi P4GN melalui media baik media online maupun media cetak secara efektif, efisien dan tepat sasaran;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan satkeholder untuk dapat mencapai target secara maksimal;
- 3) Membuat terobosan dan inovasi kreatif dalam memberikan informasi tentang P4GN untuk menarik simpati masyarakat melalui konten dan kegiatan yang melibatkan masyarakat.

2.	Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi
-----------	--

Sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di Kelurahan Sanggeng Kabupaten Manokwari, Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu rapat koordinasi pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan intervensi pelaksanaan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) Kabupaten/Kota dan capaian 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	100%

Definisi operasional dari indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika menggunakan Aplikasi Dektara, Berdasarkan Surat Deputi Pencegahan Nomor : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN tanggal 07 Desember 2022 perihal : Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Direktorat Advokasi Tahun 2022, hasil perhitungan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi yaitu setiap BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (Keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional yang perhitungannya dilakukan terpusat dimana BNNP Papua Barat memperoleh Indeks sebesar 93,839 Pada Tahun 2022 dengan kategori sangat tinggi, hasil tersebut mengalami kenaikan dari Tahun 2021 yang mendapatkan indeks 78,482. Adapun Klasifikasi penghitungan Dektara yaitu :

- 1) Nilai 88,31 – 100 masuk dalam Kategori Sangat Tinggi.
- 2) Nilai 76,61 – 88,30 masuk dalam Kategori Tinggi.
- 3) Nilai 65,00 – 76,60 masuk dalam Kategori Rendah.
- 4) Nilai 25,00 – 64,99 masuk dalam Kategori Sangat Rendah.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi selaras dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 5 keluarga dalam 1 Kabupaten/Kota dengan kategori tinggi.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi mencapai 100% adalah dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BNNP Papua Barat telah dilaksanakan dengan baik dan optimal dalam pendampingan serta bimbingan dalam pelaksanaan ketahanan keluarga anti narkoba memlalui kegiatan :

- 1) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba;
- 2) Intervensi Pelaksanaan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba;
- 3) Koordinasi Dalam Rangka Fasilitas Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa;
- 4) Rapat koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Fasilitas Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa;
- 5) Fasilitas Pelaksanaan Program Advokasi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa;
- 6) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Advokasi Prograh Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha mempertahankan keberhasilan pencapaian target Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Konsisten dalam melakukan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sesuai dengan Modul yang diberikan;

- 2) Koordinasi dengan Pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan kegiatan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan

3.

Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi

Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN dilaksanakan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Rakernis Program Pemberdayaan Masyarakat, Workshop Penggiat P4GN Instansi Pemerintah
2. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine
3. Assistensi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba
4. Sinkronisasi Program dan Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba
5. Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Instansi Pemerintah
6. Konsolidasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba bagi BUMN dan Dunia Usaha/Lingkungan Swasta
7. Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Swasta,
8. Bimbingan Teknis Penggiat P4GN di Instansi Masyarakat
9. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Masyarakat
10. Bimtek Penggiat P4GN di Lingkungan Pendidikan di Kota Sorong
11. Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Lingkungan Pendidikan di Kota Sorong

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) Kabupaten/Kota dan capaian 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	100%

Definisi operasional dari Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba; Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variable sebagai berikut :

SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.

- 1) Metode : adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan
- 2) Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- 3) Anggaran : adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- 4) Material : adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- 5) Sistem (Kebijakan) : adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- 6) Aktivitas : adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

b. Metode Pengukuran

Capaian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dihitung dari jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba.

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN dengan pengisian Kuisioner Indeks Kemandirian Partisipasi oleh penggiat anti narkoba dari setiap Instansi dalam kegiatan pemberdayaan anti narkoba yang telah dilaksanakan BNNP Papua Barat. Kriteria IKP dalam Lembaga mempunyai Karakteristik yang berbeda, penilaian IKP didasarkan tabel berikut :

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3, 25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Sehingga didapatkan hasil dari ke empat lembaga dengan rincian sebagai berikut :

NO	INSTANSI/ LINGKUNGAN	JUMLAH KUISIONER	TOTAL NILAI IKP	RATA-RATA NILAI IKP	KRITERIA
1	Instansi Pemerintah	30	3,44	3,44	Sangat Mandiri
2	Dunia Usaha/ Swasta	-	-	-	-
3	Lingkungan Pendidikan	30	3,24	3,24	Mandiri
4	Kelompok Masyarakat	30	3,44	3,44	Sangat Mandiri
Rata-Rata				3,37	Sangat Mandiri

Dari data diatas capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2022 sebesar 3,37 dengan kriteria Sangat Mandiri dengan capaian yang sama pada tahun

2021 dengan 2 lembaga dalam 1 kabupaten/kota dengan kriteria Sangat Mandiri.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi selaras dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 2 lembaga dalam 1 Kabupaten/Kota dengan kategori tinggi.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi karena dalam pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Selain faktor tersebut terjalinnya hubungan BNNP Papua Barat dengan stakeholder yang terjaga dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain itu belum terdapatnya juknis yang jelas tentang cara penilaian Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) menjadi kendala tersendiri.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan dan mempertahankan pencapaian target, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong instansi/lembaga melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui test urine secara mandiri untuk menciptakan lingkungan bersih narkoba.
- 2) Mendorong instansi/lembaga membuat penggiat anti narkoba di lingkungannya masing-masing
- 3) Meningkatkan peran instansil/lembaga dan penggiat yang telah dibentuk untuk berpartisipasi aktif mendukung program P4GN.
- 4) Melakukan pemetaan sasaran dan melakukan koordinasi awal kepada instansi terkait, sementara menunggu juknis kegiatan.

4.

Indikator Kinerja : Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”

Sasaran Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dilaksanakan di Kelurahan Malaingke di Kota Sorong. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu

1. Pemetaan Potensi Pada Kawasan Rawan Narkoba Perkotaan/Pedesaan di Kota Sorong
2. Raker Dalam Rangka Sinergitas Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder
3. Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan
4. Bimtek Pendampingan Dalam Rencana Aksi Dayatif Pada Kawasan Rawan Narkoba
5. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif Pada Kawasan Rawan Perkotaan di Kota Sorong.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada” adalah 1 (satu) Kawasan dan capaian 1 (satu) Kawasan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Malaingke di Kota Sorong dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”	1 Kawasan	1 Kawasan	100%

Definisi Operasional Pemberdayaan alternatif masyarakat anti Narkoba pada kawasan rawan adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada di kawasan yang teridentifikasi rawan narkoba dan kelompok yang

teridentifikasi rentan menyalahgunakan narkoba untuk ditingkatkan kapasitas baik individu, lembaga, lingkungan dan usahanya agar berdaya mengubah lingkungannya menjadi bersih dan bebas narkoba dan aman untuk beraktifitas.

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran status keterpulihan kawasan rawan melalui penyebaran kuisisioner indeks keterpulihan kawasan rawan narkoba (IKKR) dengan 8 indikator utama, 5 indoikator pendukung, dan 7 tingkat keberhasilan. Penilaian Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan memlaui penyebaran kuisisioner dengan kriteria sebagai berikut :

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKKR	KRITERIA PULIH
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	A	BAHAYA
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	B	WASPADA
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	C	SIAGA
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	D	AMAN

Dari data diatas dapat capaian Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan dengan Nilai Interval sebesar 2,46 atau Waspada sehingga tercapai target Tahun 2022 Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status Dari “Bahaya” menjadi “Waspada” yaitu 1 kabupaten/kota, capaian tersebut sama dengan capaian dari tahun 2021 dengan capaian 1 kabupaten/kota.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status Dari “Bahaya” menjadi “Waspada” selaras dengan

Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 1 Kabupaten/Kota dari “Bahaya” menjadi “Waspada”.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Jumlah kawasan rawan wilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjadi waspada karena dalam pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Selain faktor tersebut terjalinnya hubungan sinergitas BNNP Papua Barat dengan stakeholder yang terjaga dalam pelaksanaan kegiatan.

Sulitnya mempengaruhi warga untuk melaksanakan pola hidup sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi tantangan tersendiri.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan dan mempertahankan pencapaian target, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong seluruh stakeholder dalam intervensi berkelanjutan di kawasan rawan narkoba guna menjadikan kawasan rawan narkoba bersih dari narkoba dengan status keterpulihan yang terus menurun (dari bahaya menjadi waspada).
- 2) Mendorong pembinaan lembaga, pembinaan usaha, pembinaan lingkungan pada kawasan rawan narkoba secara mandiri dan berkelanjutan guna mempertahankan status keterpulihan yang telah menurun
- 3) Meningkatkan peran seluruh stakeholder pada kawasan rawan narkoba guna menjadikan kawasan rawan narkoba bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

5.	Indikator Kinerja : Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diIntervensi
-----------	---

Sasaran Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dilaksanakan di Kelurahan Malaingke di Kota Sorong. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Pemetaan Potensi Pada Kawasan Rawan Narkoba Perkotaan/Pedesaan di Kota Sorong

2. Raker Dalam Rangka Sinergitas Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder
3. Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan
4. Bimtek Pendampingan Dalam Rencana Aksi Dayatif Pada Kawasan Rawan Narkoba
5. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif Pada Kawasan Rawan Perkotaan di Kota Sorong.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi adalah dengan indeks 2,5 (dua koma lima) dan capaian indeks 2,46 (dua koma empat puluh enam) dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	2,5 Indeks	2,46 Indeks	98,4%

Definisi Operasional Pemberdayaan alternatif masyarakat anti Narkoba pada kawasan rawan adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada di kawasan yang teridentifikasi rawan narkoba dan kelompok yang teridentifikasi rentan menyalahgunakan narkoba untuk ditingkatkan kapasitas baik individu, lembaga, lingkungan dan usahanya agar berdaya mengubah lingkungannya menjadi bersih dan bebas narkoba dan aman untuk beraktifitas.

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran status keterpulihan kawasan rawan melalui penyebaran kuisisioner indeks keterpulihan kawasan rawan narkoba (IKKR) dengan 8 indikator utama, 5 indikator pendukung, dan 7 tingkat keberhasilan. Penilaian Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan memlaui penyebaran kuisisioner dengan kriteria sebagai berikut :

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKKR	KRITERIA PULIH
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	A	BAHAYA
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	B	WASPADA
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	C	SIAGA
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	D	AMAN

Dari data diatas dapat dicapai Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan dengan Nilai Interval sebesar 2,46 atau Waspada, Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan yang didapat BNNP Papua Barat tidak mencapai target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 2,5. Capaian Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mendapatkan nilai sebesar 3,1.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2,46}{2,5} \times 100 = 98,4\%$$

Dari data diatas capain Indikator Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi tidak mencapai target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target nilai 2,5.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Jumlah kawasan rawan wilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjadi waspada karena dalam pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Selain faktor tersebut terjalinnya hubungan sinergitas BNNP Papua Barat dengan stakeholder yang terjaga dalam pelaksanaan kegiatan.

Sulitnya mempengaruhi warga untuk melaksanakan pola hidup sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi tantangan tersendiri.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan dan mempertahankan pencapaian target, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong seluruh stakeholder dalam intervensi berkelanjutan di kawasan rawan narkoba guna menjadikan kawasan rawan narkoba bersih dari narkoba dengan status keterpulihan yang terus menurun (dari bahaya menjadi waspada)
- 2) Mendorong pembinaan lembaga, pembinaan usaha, pembinaan lingkungan pada kawasan rawan narkoba secara mandiri dan berkelanjutan guna mempertahankan status keterpulihan yang telah menurun
- 3) Meningkatkan peran seluruh stakeholder pada kawasan rawan narkoba guna menjadikan kawasan rawan narkoba bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

6.	Indikator Kinerja : Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih
-----------	---

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Bimbingan Teknis Petugas IBM
2. Monitoring Rencana Aksi

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih adalah 10 (sepuluh) orang dan capaian 10 (sepuluh) orang dengan rincian capaian sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

Definisi Operasional Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih adalah banyaknya petugas layanan IBM yang mendapatkan kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh BNNP Papua Barat pada tahun 2022 dilaksanakan di Desa Sanggeng.

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan yaitu dengan pre test dan post test pada saat bimbingan teknis untuk mengetahui pemahaman petugas penyelenggara pelayanan IBM (Agen Pemulihan) terkait dengan materi bimbingan teknis IBM sehingga Agen Pemulihan dapat menjalankan layanan IBM, kemudian didapatkanlah Agen Pemulihan yang terlatih sebanyak 10 orang pada Tahun 2022, hasil tersebut hampir sama dengan capaian Tahun 2021 sebanyak 11 orang Agen Pemulihan yang terlatih.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{10}{10} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih selaras dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 10 orang

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih sebesar 100% yaitu koordinasi dan sinergitas yang terjalin dengan baik antara BNNP Papua Barat dengan agen pemulihan, serta dalam kegiatan penguatan penyelenggara layanan rehabilitasi IBM terlaksana dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Selain itu dalam pengumpulan Agen Pemulihan sedikit mengalami kendala dikarenakan Agen pemulihan memiliki kesibukan lain.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia IBM dalam hal ini Agen Pemulihan sebagai penyelenggara layanan rehabilitasi IBM, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah dengan melakukan asistensi berkala baik secara daring maupun luring bagi Agen Pemulihan sebagai *refresher* pemahaman Agen Pemulihan mengenai layanan IBM. Selain itu

BNNP Papua Barat berupaya untuk meningkatkan peran stakeholder untuk ikut berpartisipasi mendukung program rehabilitasi IBM bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba.

7.	Indikator Kinerja : Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis
-----------	--

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Kompetensi Teknis.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis Yang Terlatih adalah 10 (sepuluh) orang dan capaian 10 (sepuluh) orang dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	10 Orang	10 Orang	100%

Difinisi Operasional Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah banyaknya petugas rehabilitasi yang telah mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi teknis / uji kompetensi konselor adiksi yang dilaksanakan oleh BNNP Papua Barat.

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan yaitu dengan pre test dan post test pada saat kegiatan dilaksanakan. Pretest dan posttest dilaksanakan dalam bentuk tes formal untuk menentukan penguasaan petugas terhadap materi dan praktik terkait proses rehabilitasi. kemudian didapatkanlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis sebanyak 10 orang pada Tahun 2022, hasil sama dengan capaian Tahun 2021 sebanyak 10 orang Agen Pemulihan yang terlatih.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{10}{10} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis Tahun 2022 sebanyak 10 orang dan sesuai dengan target dari Perjanjian Kinerja, tetapi target tahun 2022 tidak sesuai dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 25 orang karena adanya penyesuaian target dan anggaran.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis sebesar 100% yaitu BNNP Papua Barat mendorong serta membimbing petugas rehabilitasi agar menguasai materi dan praktik terkait layanan rehabilitasi sehingga menjadi petugas yang kompeten serta tersertifikasi.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi BNNP Papan Barat akan terus melakukan bimbingan teknis dan asistensi sehingga dapat meningkatkan kapasitas petugas rehabilitasi. Kedepannya dalam pelaksanaan uji sertifikasi di tahun berikutnya akan dilaksanakan bimbingan pra uji sertifikasi.

8.	Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi
-----------	--

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal

(SPM) di Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) lembaga dan capaian 1 (satu) lembaga dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

Definisi Operasional Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi adalah banyaknya fasilitas kesehatan penyelenggara layanan rehabilitasi yang telah dilakukan penilaian untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi Papua Barat.

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran pada kegiatan ini yaitu penilaian standar mutu sesuai formulir penilaian SNI 8807-2019 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Formulir berisi poin-poin capaian yang harus dipenuhi oleh lembaga Penyelenggara layanan rehabilitasi dalam hal ini RSUD Kabupaten Raja Ampat dan dinilai berdasarkan bukti dukung yang dipersyaratkan. Sehingga pada tahun 2022 BNNP Papua Barat telah mencapai target 1 Lembaga yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), hasil tersebut sama dengan capaian Tahun 2021 sebanyak 1 Lembaga yaitu Klinik Pratama “Kasuari”.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi Tahun 2022 sebanyak 1 Lembaga sesuai dengan target dari Perjanjian Kinerja, tetapi target tahun 2022 tidak sesuai dengan Rencana Program Kerja Jangka

Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 2 Lembaga karena adanya penyesuaian target dan anggaran.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi karena dalam pelaksanaan kegiatan BNNP Papua Barat selalu memberikan bimbingan dan pengarahan. Selain faktor tersebut terjalinnya hubungan BNNP Papua Barat dengan stakeholder yang terjaga dalam pelaksanaan kegiatan. Kendala yang dihadapi dengan kondisi geografis dalam fasilitas memerlukan usaha lebih agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), BNNP Papua Barat akan terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lebih banyak stakeholder serta akan terus memberikan bimbingan guna meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi agar jauh lebih baik.

9.	Indikator Kinerja : Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi
-----------	---

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembentukan Unit IBM, Asistensi, dan Evaluasi Unit IBM

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) unit dan capaian 1 (satu) unit dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	1 Unit	1 Unit	100%

Definisi operasional dari Jumlah Unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian unit IBM yang operasional adalah melalui formulir monitoring dan evaluasi IBM. IBM yang operasional berada di Kelurahan Sanggeng dengan 10 Agen Pemulihan sebagai pelaksana teknis IBM. Berdasarkan Surat Deputi Rehabilitasi Nomor B/ 4333 /XII/DE/RH.03/2022/BNN tanggal 26 Desember 2022 tentang Pemberitahuan Hasil Monitoring IBM Bulan November-Desember 2022, IBM Kelurahan Sanggeng yang dibina oleh BNNP Papua Barat berada pada Fase Tangguh. Sehingga pada tahun 2022 BNNP Papua Barat telah mencapai target Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi sebanyak 1 unit, capaian tersebut sama dengan capaian Tahun 2021 sebanyak 1 unit yang terletak di Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi Tahun 2022 sebanyak 1 Unit sesuai dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 1 Unit IBM.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM sebesar 100 % adalah koordinasi dan sinergitas yang baik antara BNNP Papua Barat dengan unit IBM Kelurahan Sanggeng dan pendampingan yang optimal dari tim Rehabilitasi BNNP Papua Barat. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya Agen Pemulihan yang memiliki banyak waktu luang untuk mengikuti pengarahan dan pelatihan sehingga harus menyesuaikan waktu pelaksanaan.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM, BNNP Papua Barat mengintensifkan sosialisasi bahaya Narkoba dan mensosialisaikan program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba, serta meningkatkan peran stakeholder untuk ikut berpartisipasi mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba. Selain itu kedepan akan disepakati bersama waktu untuk melaksanakan kegiatan pengarahan dan pelatihan

10.	Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat
------------	---

Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis

Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi adalah 3,2 (tiga koma dua) dan capaian 3,67 (tiga koma enam tujuh) dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	3,2 Indeks	3,66 Indeks	115%

Definisi operasional dari Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi. Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capain Indeks kepuasan layanan Masyarakat dengan menggunakan kuesioner yang diberikan pada klien dan diinput nilainya melalui Format yang telah disediakan oleh Direktorat Pascarehabilitasi BNN RI melalui <https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id> sehingga didapatkan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 adalah 3,66 atau dalam kategori Sangat Baik, capaian tersebut mengalami kenaikan dari Tahun 2021 yang memperoleh nilai sebesar 3,2.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3,66}{3,22} \times 100 = 115\%$$

Dari data diatas capain Indikator Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2022 sebesar 3,66 melebihi target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat sebesar 3,2.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target capaian Indeks kepuasan Masyarakat sebesar 100 % adalah koordinasi dan sinergitas yang baik antara BNNP Papua Barat dengan klien serta penyelenggara layanan rehabilitasi sehingga klien dapat melengkapi data survey. Selain itu belum memilikinya BNNP Papua Barat Gedung sendiri membuat kesulitan untuk terus meningkatkan fasilitas agar menambah kualitas pelayanan.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan capaian Indeks kepuasan Masyarakat, BNNP melakukan upaya sistematis dalam berkoordinasi dan menjangkau klien yang mengakses layanan rehabilitasi sehingga pengukuran indeks kepuasan masyarakat dapat lebih efisien di tahun anggaran berikutnya. Serta meningkatkan pelayanan dengan segala keterbatasan agar dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

11.	Indikator Kinerja : Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21
------------	--

Sasaran Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21 adalah 7 (tujuh) berkas dan capaian 8 (delapan) berkas dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	7 Berkas	8 Berkas	114%

Definisi operasional Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tindak pidana Narkotika yang telah lengkap dan telah diterima oleh Kejaksaan untuk diperiksa kelengkapannya, apabila sudah memenuhi syarat maka akan dilimpahkan ke Pengadilan.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capain Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P21 adalah melalui kegiatan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika yang telah dilaksanakan BNNP Papua Barat selama Tahun 2022 yang telah dikirim ke Kejaksaan dan telah diperiksa kelengkapannya. Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P21 dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	LKN	BERKAS	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P21
1	LKN-001	BERKAS 1	MUHAMMAD NUR TAQWA	P21	MARET	P21 24 Mei 2022
		BERKAS 2	HALIM	P21		P21 24 Mei 2022
2	LKN-002	BERKAS 3	MUSTARI A.	P21	MARET	P21 17 Mei 2022
3	LKN-003	BERKAS 4	HERMAN	P21	JULI	P21 28 Oktober 2022
		BERKAS 5	CHOIROEL BASOR	P21		P21 28 Oktober 2022
		BERKAS 6	ALFRIED YULDONA BOHAM	P21		P21 28 Oktober 2022
4	LKN-004	BERKAS 7	YULIN AGUSTINA KIRIHIO	P21	AGUSTUS	P21 27 Oktober 2022
5	LKN-005	BERKAS 8	IRIANTO	P21	OKTOBER	P21 19 Desember 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21 BNNP Papua Barat Tahun 2022 sebanyak 8 Berkas Perkasara, Capaian tersebut meningkat dari capaian Tahun 2021 yang berjumlah 7 Berkas Perkara.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{8}{7} \times 100 = 114\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21 BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2022 sejumlah 8 Berkas perkara melebihi target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat sejumlah 5 berkas perkara.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P21 sebesar 114% adalah :

- 1) Pelaksanaan kegiatan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika yang efektif, efisien dan tepat sasaran;
- 2) Komitmen yang tinggi pimpinan dan tim pemberrnatasan BNNP Papua Barat dalam mengungkap peredaran gelap narkoba.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha untuk memerangi peredaran gelap Narkotika, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Memetakan kembali jaringan sindikat peredaran gelap narkotika yang beroperasi di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya;
- 2) Meningkatkan sarana dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan intelijen berbasis teknologi;
- 3) Meningkatkan kemampuan personil intelijen untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.

12.	Indikator Kinerja : Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan
------------	---

Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan adalah 100 (seratus) dan capaian 100 (seratus) dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%

Definisi operasional dari nilai tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi : tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

b. Metode Pengukuran

Definisi dari Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan adalah pelayanan perawatan dan pengawasan tahanan tindak pidana narkoba dan tahanan TPPU hasil tindak pidana narkoba. Adapun metode pengukurannya adalah dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas. Capaian Indikator Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan BNNP Papua Barat Tahun 2022 sama dengan capaian Tahun 2021 yaitu dengan Indeks 100.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan BNNP Papua Barat Tahun 2022 sama dengan Rencana

Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat yaitu dengan indeks 100.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Nilai Tingkat Keamanan dan Ketertiban Kesehatan Tahanan yaitu terjaganya sinergitas dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pengawasan Tahanan. Kendala yang dihadapi belum adanya Ruang Tahanan yang lebih memadai.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha untuk memerangi peredaran gelap Narkotika, maka rencana aksi dan strategi kedepan yaitu nenpererat sinergitas dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penanganan tahanan, dikarenakan BNNP Papua Barat sampai saat ini belum memiliki Kantor dan Ruang Tahanan yang memadai.

13.	Indikator Kinerja : Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika
------------	--

Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika adalah 100 (seratus) dan capaian 100 (seratus) dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100%

Definisi operasional dari nilai tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika

yang dapat mengganggu proses penyidikan seperti hilangnya a barang bukti atau rusaknya barang bukti.

b. Metode Pengukuran

Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika adapun metode pengukurannya adalah dengan tingkat pengawasan dan pemeliharaan dan pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika tidak ada masalah seperti barang bukti hilang, kecuali adanya penyusutan untuk keperluan penyidikan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan mendata, mengamankan, dan mengawasi barang bukti Narkotika dan Non Narkotika serta melakukan pemusnahan barang bukti apabila berkas sudah P21 dengan disaksikan stakeholder yang bersangkutan. Capaian Indikator Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika BNNP Papua Barat Tahun 2022 sama dengan capaian Tahun 2021 yaitu dengan Indeks 100.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika BNNP Papua Barat Tahun 2022 sama dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat yaitu dengan indeks 100.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dengan keterbatasan sarana dan prasarana BNNP Papua Barat Berupaya untuk bekerja secara professional. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu belum adanya penyimpanan barang bukti Narkotika yang terkhusus untuk Seksi Wastahti dan untuk sementara narkotika di simpan di dalam brangkas penyimpanan senjata api organic BNNP Papua Barat.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

BNNP Papua Barat akan mempertahankan kinerja dalam memerangi Narkoba dan berupaya untuk mengajukan untuk dapatkan alokasi anggaran

belanja modal berupa pembelian brankas penyimpanan Barang Bukti Narkotika.

14.

Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat

Sasaran Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat adalah 88 (delapan puluh delapan) dan capaian 69,46 (enam puluh sembilan koma empat puluh enam) dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Indikator Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	88 Indeks	69,46 Indeks	78,93%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNNP Papua Barat adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNNP yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNNP Papua Barat diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan. yang tersedia pada aplikasi <https://smart.kemenkeu.go.id>. Dimana BNNP Papua Barat Tahun 2022

memperoleh Indeks sebesar 69,46, hasil tersebut jauh menurun dari capaian Tahun 2021 sebesar 86,78.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{69,46}{88} \times 100 = 78,93\%$$

Dari data diatas capain Indikator Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat Tahun 2022 dibawah target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat yaitu dengan indeks 92.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor target Nilai kinerja anggaran BNNP Papua Barat sebesar 78,93% atau dengan Indeks 69,46 adalah Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan mengalami banyak penyesuaian dikarenakan ada pemblokiran ditengah tahun anggaran berjalans sehingga kinerja anggaran banyak terjadi revisi sehingga kurang optimal.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNNP Papua Barat, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada BNNP Papua Barat dengan meningkatkan sinergitas dengan semua bidang.

15.	Indikator Kinerja : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat
------------	---

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur.

a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat adalah 95 (Sembilan puluh lima) dan capaian 96,77 (sembilan puluh enam koma tujuh puluh tujuh) dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	95 Indeks	96,77 Indeks	102%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BNNP Papua Barat adalah dilihat dari kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang tersedia pada aplikasi OMSPAN dengan rincian capaian sebagai berikut :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total x Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	005	006	682761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	73.32	98.06	100.00	100.00	97.09	100.00	100.00	96.77	100%	96.77
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.33	19.73	10.00	10.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	86.86		99.15			100.00					

Disclaimer:

Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-3/PB.2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat Tahun 2022 sebesar 96,77, Capaian tersebut menurun dari capaian Tahun 2021 dengan indeks sebesar 98,27.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{96,77}{95} \times 100 = 102\%$$

Dari data diatas capain Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat Tahun 2022 sebesar 96,77, hasil tersebut melebihi sedikit dari target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat sebesar 96.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BNNP Papua Barat melebihi 100% adalah Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dan dapat dilaksanakan secara efektif efisien dan tepat sasaran. Kendala yang dihadapi yaitu adanya Automatic Adjustment sehingga harus menyesuaikan kinerja dengan anggaran yang ada.

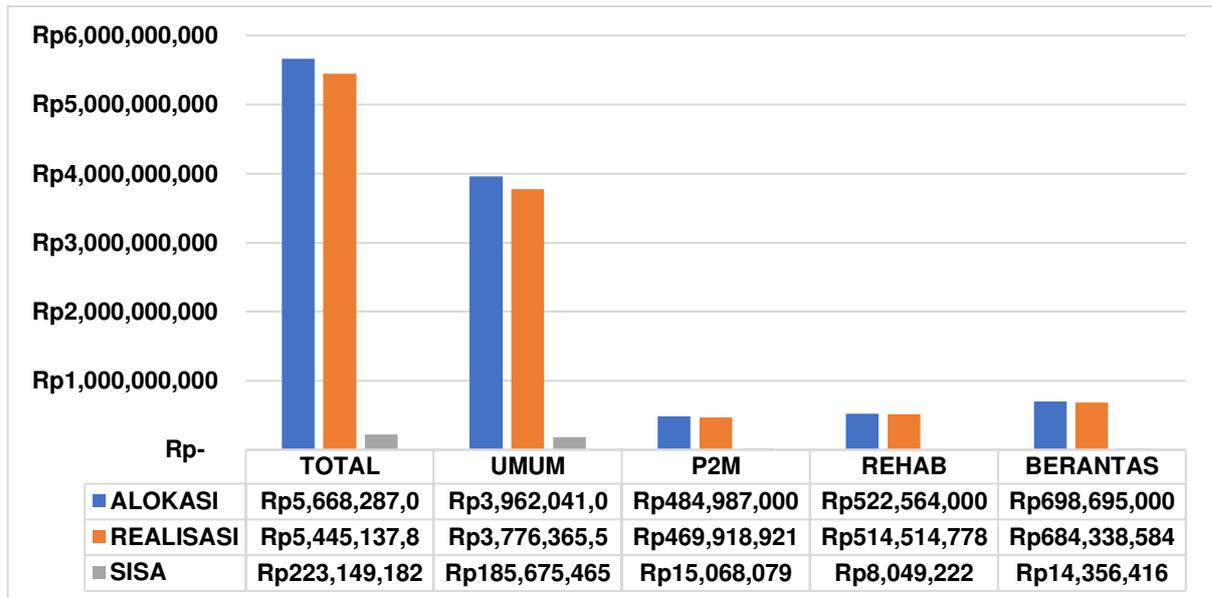
d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BNNP Papua Barat, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada BNNP Papua Barat dengan melihat pengalaman tahun 2022.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022 BNNP Papua Barat mendapat total alokasi anggaran Rp5.668.287.000,- dengan realisasi keuangan Rp5.445.137.818,- atau 96,06% dengan sisa anggaran sebesar Rp223.149.182,- atau setara dengan 3,94% anggaran belum terserap. Dalam perjalanan Tahun Anggaran 2022 BNNP Papua Barat mendapatkan Automatic Adjustment sehingga mengakibatkan BNNP Papua Barat harus melakukan Efisiensi Anggaran untuk dapat menunjang kegiatan di BNNP Papua Barat. Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran BNNP Papua Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Data Alokasi dan Realisasi anggaran BNNP Papua Barat
Tahun 2022



Tabel 3.1 Data Realisasi Anggaran BNNP Papua Barat Tahun 2022

KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
BIDANG UMUM					
3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.362.564.000	1.264.715.977	97.848.023	92,82%
3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26.762.000	21.953.117	4.808.883	82,03%
3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	37.062.000	21.541.850	15.520.150	58,12%
3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.040.000	5.130.000	910.000	84,93%
3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.440.474.000	2.392.821.628	47.652.372	98,05%
3239.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50.139.000	48.810.963	1.328.037	97,35%
3979.EBA	Penyelenggara Kehumasan dan Keprotokolan	39.000.000	21.392.000	17.608.000	54,85%
BIDANG P2M					
3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40.000.000	36.398.000	3.602.000	91,00%
3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	57.385.000	49.275.000	8.110.000	85,87%
3248.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	122.122.000	122.120.100	1.900	99,99%
3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	204.980.000	203.666.787	1.313.213	99,36%
BIDANG REHABILITASI					
3256.FAE	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	40.978.000	38.018.000	2.960.000	92,78%
3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	10.210.000	10.210.000	-	100%

KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
3259.ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	208.275.000	207.815.000	459.400	99,78%
3260.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	194.799.000	190.636.500	4.162.500	97,85%
3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	68.302.000	67.834.678	467.322.	99,32%
BIDANG PEMBERANTASAN					
3251.BKA	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	75.000.000	74.938.827	61.173	99,92%
3258..BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	54.775.000	44.450.000	10.325.000	81,15%
3258.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	50.500.000	50.500.000	-	100%
3258.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	72.020.000	68.573.440	3.446.560	95,21%
5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	446.400.000	445.876.317	523.683	99,88%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun 2022 menyajikan hasil dari capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- Hasil pengukuran kinerja indikator kinerja kegiatan (IKK) menunjukkan sebagian besar indikator pada IKK telah tercapai bahkan ada beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian masih ada indikator kinerja yang pencapaiannya belum maksimal, namun dengan segala keterbatasan yang ada telah dilakukan berbagai upaya optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Realisasi anggaran BNNP Papua Barat mencapai Rp5.445.137.818,- atau 96,06% dengan sisa anggaran sebesar Rp223.149.182,- atau setara dengan 3,94% anggaran belum terserap.

B. Saran dan Harapan

- Penguatan Personil BNNP Papua Barat dengan penambahan Pegawai PNS/Polisi/TNI agar mendekati jumlah minimal pegawai sesuai DSP, serta pengembangan SDM yang ada di BNNP Papua Barat dengan meningkatkan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan kepada Personel/staf untuk mencapai kerja yang Profesional.
- Mengoptimalkan Koordinasi, dukungan, dan peran aktif stakeholder dan masyarakat dalam program P4GN di Provinsi Papua Barat.
- Meningkatkan kerjasama dan peran aktif media-media lokal dan nasional untuk membantu mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN II : HASIL PERHITUNGAN DEKTARA DIREKTORAT ADVOKASI DEPUTI PENCEGAHAN BNN RI TAHUN 2022


BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871568, 80871567
Faksimil : (62-21) 80885225, 80871531, 80871592, 80871593
Email : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

Nomor : B/472/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN Jakarta, 7 Desember 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Dektara) Direktorat Advokasi Tahun 2022

Kepada :

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi;
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024;
- Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2022.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2022 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan skala Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2022 adalah 84,274 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,68 (Kategori Tinggi). Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 55 Satuan Kerja
- Kategori tinggi (78,61 – 88,30) sebanyak 136 Satuan Kerja
- Kategori rendah (65,00 – 78,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
- Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 1 Satuan Kerja

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2022 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.

4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan

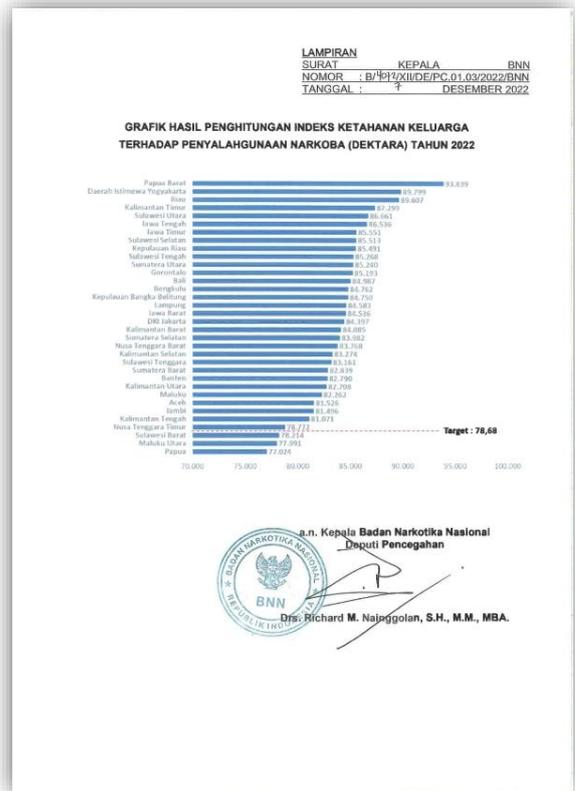



Tembusan :

- Kepala BNN
- Sekretaris Utama BNN
- Inspektur Utama BNN

LAMPIRAN SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/472/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN
TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,679	TINGGI
207	BNNP PAPUA BARAT	93,839	SANGAT TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2022		84,274	TINGGI



LAMPIRAN III : HASIL PERHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI BNNP PAPUA BARAT TAHUN 2022

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PEMBOBOTAN IKP

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN	BOBOT
1	MANUSIA	20%	1. Apakah ada Penggaji (Bagas P4GN di lingkungan masyarakat?	10
			2. Adanya Tokoh masyarakat/Tokoh Agama / Tokoh Adat / Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN.	10
2	METODE	10%	1. Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?	5
			2. Apakah adanya deteksi/riksa integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?	5
3	ANGGARAN	20%	1. Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung glat P4GN?	20
4	SISTEM	20%	1. Apakah ada Peraturan Daerah tentang P4GN (PerDa / PerGub / PerBup / PerWal.Surat Edaran). Keterangan : Jika ada PerDa / PerGub / PerBup / PerWal bobot Nilai = 4 Jika ada Surat Edaran bobot Nilai = 2)	4

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN	BOBOT
5			5. Apakah anggota keluarga pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, Pemberantasan/Penyalahgunaan dan Peredaran/GelapNarkoba (P4GN)?	3
			6. Apakah Keluarga memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?	3
6	KEGIATAN	20%	7. Apakah di wilayah ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan/ Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Pengasi P4GN dan stakeholder?	2
			8. Apakah di wilayah ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?	2
			9. Apakah di wilayah ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?	2
			10. Apakah di Wilayah selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?	2

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN	BOBOT
4	SISTEM	20%	2. Apakah di lingkungan tempat tinggal ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?	4
			3. Apakah proses peradilan kasus Indeks pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?	4
			4. Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?	4
			5. Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?	4
			6. Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/rujukan/ucalm/masyarakat dalam rangka P4GN?	4
5	SARPRAS	10%	1. Apakah ada laporan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/rujukan/ucalm/masyarakat melalui media sosial/media elektronik/ media cetak?	2
			2. Apakah ada laporan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/rujukan/ucalm/masyarakat melalui media sosial/media elektronik/ media cetak?	2

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN	BOBOT
5	SARPRAS	10%	3. Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?	1
			4. Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?	3
6	KEGIATAN	20%	1. Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat (berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak bertempat hiburan malam/Dugem)?	2
			2. Apakah anggota keluarga selalu aktif berinteraksi positif (salafahmi) di lingkungan tempat tinggal?	1
			3. Apakah anggota keluarga selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial / keagamaan di lingkungan tempat tinggal?	1
			4. Apakah dalam keluarga selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?	1

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN	BOBOT
6	KEGIATAN	20%	11. Apakah di wilayah ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?	1

Keterangan :
Urut memperoleh nilai IKP dari masing - masing lembaga, penghitungan dilakukan dengan rumus :

$$IKP = \frac{\text{Hasil penghitungan kuisisioner}}{25}$$

Mengingat Kriteria IKP dalam lembaga mempunyai karakteristik yang berbeda, maka penilaian IKP didasarkan tabel berikut.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	29,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Contoh Simulasi Penghitungan :

Hasil Penghitungan kuisisioner = 70

Penghitungan hasil IKP : $IKP = \frac{70}{25}$

= 2,8

Nilai 2,8 ada di dalam interval 2,51 – 3,25 dengan kriteria IKP adalah Mandiri

LAMPIRAN IV : HASIL PERHITUNGAN INDEKS KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN BNNP PAPUA BARAT TAHUN 2022

Jumlah Total Nilai Responden :

N1 nilainya 2,58 N3 nilainya 2,64 N5 nilainya 2,08
N2 nilainya 2,58 N4 nilainya 2,56 N6 nilainya 2,26
N7 nilainya 2,54

Dengan data tersebut maka IKKR dapat dihitung sebagai berikut:

$$(2,58 + 2,58 + 2,64 + 2,56 + 2,08 + 2,26 + 2,54) : 7 = 17,24 : 7 = \mathbf{2,46}$$

Nilai 2,46 ini dimasukkan dalam tabel di bawah ini:

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKKR	KRITERIA PULIH
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	A	BAHAYA
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	B	WASPADA
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	C	SIAGA
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	D	AMAN

Dengan demikian nilai IKKR hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKKR setelah dikonversi = **2,46 (B)**
- Nilai Interval (posisi nilai IKKR) = **antara 1.76 – 2.50**
- Nilai interval Konversi dikalikan 25 = **2,46 x 25 = 61,5**
- Kategori IKKR = **B**
- Kriteria Keterpulihan **WASPADA**.

LAMPIRAN V : PEMBENTUKAN IBM BNNP PAPUA BARAT TAHUN 2022

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI PAPUA BARAT
 Jl. Easa Sesa - Manokwari, Papua Barat
 Telp. 081344606171 Fax : 09861 213212
 Email : bnnp.papubar@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : KEP/190/IBKAR/03/2022/BNNP

TENTANG
PENETAPAN LOKASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

- bahwa dalam rangka penetapan lokasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) dipandang perlu untuk menunjuk lokasi dalam kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat;
- bahwa untuk pelaksanaan butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Badan Narkotika Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4DN;
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/23/01/DE/03/2022/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2022;
- DIPA, Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Nomor: DIPA-SP DIPA DIPA-006.01.2.682761/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

Kesatu :

- Menetapkan Kelurahan Sanggeng Kabupaten Manokwari Papua Barat sebagai Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Tahun 2022;

Kedua :

- Peleaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Sanggeng Kabupaten Manokwari Papua Barat agar diimbangi dengan Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Penetapan Agen Pemulihan (AP) agar ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah/ Kepala Kampung/Desa;

Ketiga :

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, menyuguhkan teknis pelaksanaan akan diatur kemudian;

Keempat :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
 Pada tanggal : 25 Maret 2022
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI PAPUA BARAT

HERY ISTU HARIYONO, S.S.

Tembusan :

- Kepala BNN RI di Jakarta;
- Deputi Kabahutani BNN RI di Jakarta;
- Kepala Kelurahan Sanggeng Manokwari;
- Peringat.

PEREMINTAH KABUPATEN MANOKWARI
KELURAHAN SANGGENG
DISTRIK MANOKWARI BARAT
 Alamat: JLS.Cendogeng,SH, Kel.Sanggeng, Kec. Manokwari Barat Barat Kode Pos. 98112

KEPUTUSAN LURAH SANGGENG
NOMOR : 053/25/2022/HEL-SGG
TENTANG
PERUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
AGEN PEMULIHAN PADA TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KELURAHAN SANGGENG DISTRIK MANOKWARI BARAT

Menimbang :

- Bahwa untuk ikut berpartisipasi dalam mengantarkan masalah penyalahgunaan Narkoba yang telah menjadi masalah umum dan potensi sumber daya untuk menangani pun ada di masyarakat;
- Bahwa untuk memenuhi hak-hak penyalahguna narkoba tersebut di atas, Kelurahan Sanggeng perlu mengayakakan pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di tingkat Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b di atas, maka perlu menetapkan keputusan Lurah Sanggeng tentang Perunjukan dan Pengangkatan Agen Pemulihan sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Badan Narkotika Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4DN;
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/23/01/DE/03/2022/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2022;
- DIPA, Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Nomor: DIPA-SP DIPA DIPA-006.01.2.682761/2022 tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan :

- Hasil Rapat bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dan Kepala Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Tanggal 9 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Keputusan Lurah Sanggeng tentang Perunjukan dan Pengangkatan Agen Pemulihan sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

Kesatu :

- Menetapkan nama-nama Agen Pemulihan sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua :

- Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Sanggeng mempunyai tugas:
 - Melakukan pemetaan wilayah terkait penyalahgunaan narkoba;
 - Mengidentifikasi pengguna narkoba di wilayah Kelurahan Sanggeng;
 - Memberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat;
 - Melakukan pendekatan terhadap pengguna narkoba dan mengidentifikasi tingkat pemalahannya;
 - Melakukan pendampingan dan memberikan dukungan kepada pengguna narkoba dengan tingkat resiko rendah dan melakukan upaya-upaya rujukan bila dibutuhkan oleh pengguna narkoba yang didampingi;
 - Menganalisis jejaring kerja dalam rangka keberlangsungan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Sanggeng.

Ketiga :

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Agen Pemulihan sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Provinsi Papua Barat perlu berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat.

Keempat :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan masa akan diadakan perbaikan seperkaya.

Ditetapkan di : Manokwari
 Pada tanggal : 25 Maret 2022
Kepala Kelurahan Sanggeng
Distrik Manokwari Barat

HERY ISTU HARIYONO, S.S.
 NIP. 19720602195091001

Tembusan :

- Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat di Manokwari;
- Kepala Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari di Manokwari;
- Kabup Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab.Manokwari;
- Peringat.

PEREMINTAH KABUPATEN MANOKWARI
KELURAHAN SANGGENG
DISTRIK MANOKWARI BARAT
 Alamat: JLS.Cendogeng,SH, Kel.Sanggeng, Kec. Manokwari Barat Barat Kode Pos. 98112

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 053/25/2022/HEL-SGG
Tanggal : 25 Maret 2022

DAFTAR NAMA AGEN PEMULIHAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KELURAHAN SANGGENG DISTRIK MANOKWARI BARAT
TAHUN 2022

No	Nama Lengkap
1	YULIUS HENRY BISAY
2	MESAK YERMAS MAMBOR
3	MARIA MAKER
4	MARHOCE BONGGOBO
5	MARILIA KARANI
6	ELISA MESAK DEMETOUW
7	JACKSON VERIMON AK.SU
8	JHON FERRI GREGORIUS KAMBU
9	TONY ZYAKI KAUMFU
10	YOHANES RONSUMBRE

Ditetapkan di : Manokwari
 Pada tanggal : 25 Maret 2022
Kepala Kelurahan Sanggeng
Distrik Manokwari Barat

HERY ISTU HARIYONO, S.S.
 NIP. 19720602195091001

Tembusan :

- Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat di Manokwari;
- Kepala Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari di Manokwari;
- Kabup Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab.Manokwari;
- Peringat.

BIODATA AGEN PEMULIHAN KELURAHAN SANGGENG
TAHUN 2022

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Alamat Lengkap	Pekerjaan	Keterangan*
1.	YULIUS HENRY BISAY	92021250784003	L	Jl. S. Dufur	Wiraswasta	*Lampiran KTP
2.	MESAK YERMAS MAMBOR	91710409678000	L	Jl. S. Dufur	Wiraswasta	*Lampiran KTP
3.	MARIA MAKER	920215131740002	P	Jl. S. Dufur	Mengurus Rumah Tangga	*Lampiran KTP
4.	MARHOCE BONGGOBO	920212503780002	P	Jl. Ciliwung	Belum/Tidak Beberha	*Lampiran KTP
5.	MARILIA KARANI	920224258850001	P		Mengurus Rumah Tangga	*Lampiran KTP
6.	ELISA MESAK DEMETOUW	920210609830001	L		POJRI	*Lampiran KTP
7.	JACKSON VERIMON	920201206530001	L	Jl.Mamberamo	Pensiunan	*Lampiran KTP
8.	JHON FERRI GREGORIUS KAMBU	920212010280003	L	Jl. Serayu	Wiraswasta	*Lampiran KTP
9.	TONY ZYAKI KAUMFU	920212005750001	L	Jl. Mamberamo	Karyawan Honorer	*Lampiran KTP
10.	YOHANES RONSUMBRE	9202122512790001	L	Jl. Ciliwung	Wiraswasta	*Lampiran KTP

*Melampirkan KTP/KK

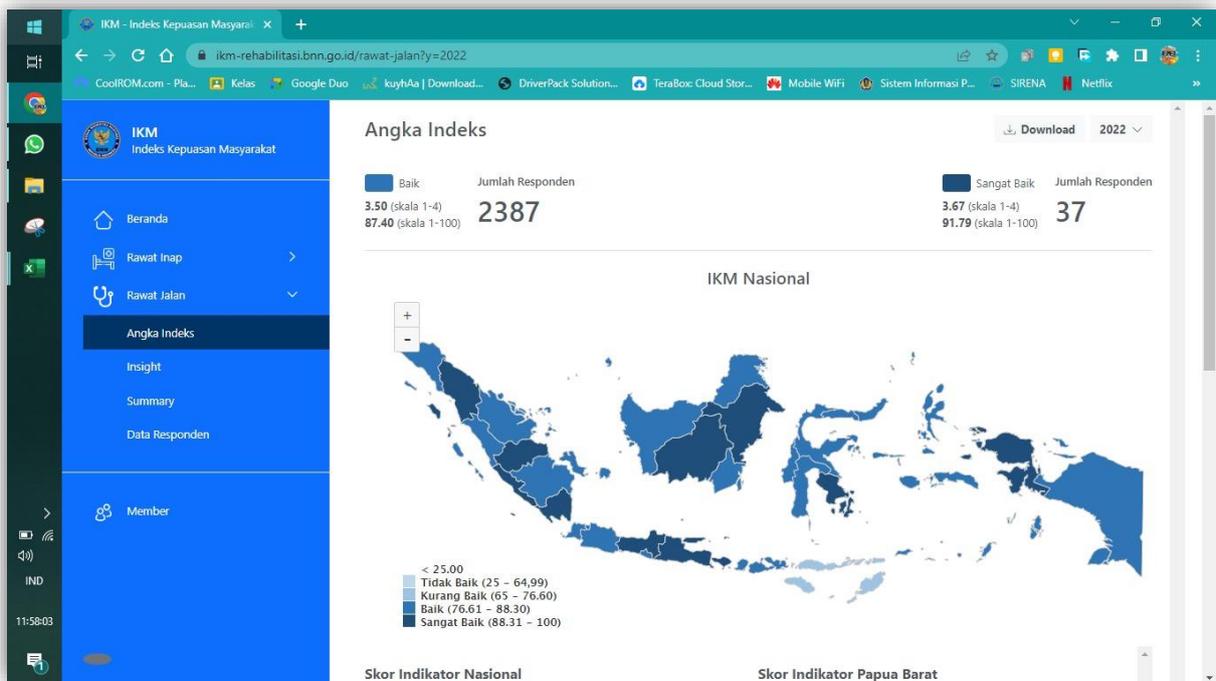
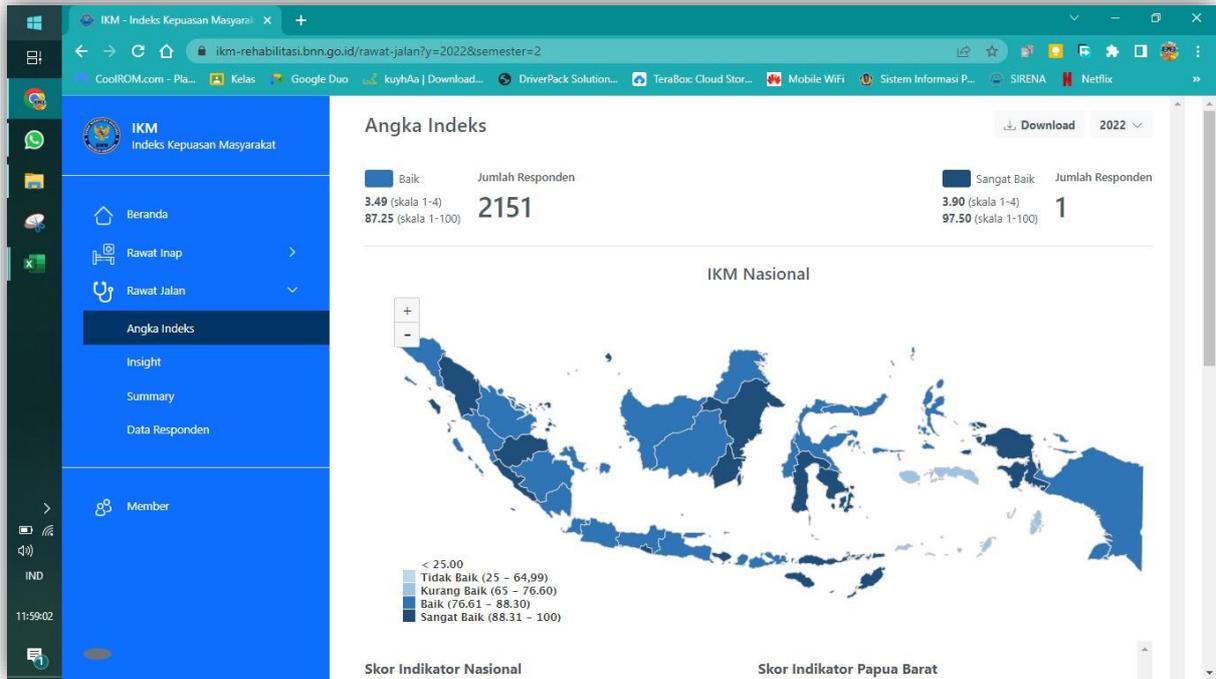
Ditetapkan di : Manokwari
 Pada tanggal : 25 Maret 2022
Kepala Kelurahan Sanggeng
Distrik Manokwari Barat

HERY ISTU HARIYONO, S.S.
 NIP. 19720602195091001

**LAMPIRAN VI : LEMBAGA REHABILITASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM) BNNP PAPUA BARAT TAHUN 2022**



LAMPIRAN VII : INDEKS KEPUASAN LAYANAN KLINIK REHABILITASI BNNP PAPUA BARAT TAHUN 2022



LAMPIRAN VIII : NILAI KINERJA ANGGARAN BNNP PAPUA BARAT TAHUN 2022

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) TA.2022 Per 15 Januari 2023

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	418543	Loka Rehabilitasi Narkoba BNN, Kalianda Lampung Selatan	30,45	99,32	66,92	19,86	-20	0
2	418307	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PIDIE	41,4	99,54	98,48	31,78	-20	0
3	403717	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	51,23	98,21	99,58	43,29	-13,36	16,59
4	081240	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASAMAN BARAT	52,45	99,13	93,04	59,55	-20	0
5	419257	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala	55,14	99,48	90,43	66,75	-20	0
6	689540	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG	58,5	97,42	97,57	71,94	-20	0
7	418537	Loka Rehabilitasi Narkoba BNN, Batam Kepulauan Riau	59,87	99,41	97,47	74,69	-20	0
8	419262	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna	60,92	100	87,09	81,31	-20	0
9	689863	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TUAL	60,96	96,48	97,11	52,84	-4,7	38,26
10	682590	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI	61,1	98,06	98,32	77,45	-20	0
11	419263	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOALEMO	61,79	99,9	96,42	79,43	-20	0
12	165162	Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah	68,77	89,39	94,74	75,33	-5,9	35,26
13	419259	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow	68,97	98,75	96,44	67,3	-2,42	43,94
14	682761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	69,46	96,06	81,28	75,03	-2,23	44,43
15	061818	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PIDIE JAYA	69,57	97,9	96,62	67	-1,34	46,65
16	689760	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BITUNG	73,09	97,79	98,34	70,07	1,3	53,25
17	418323	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	75,13	97,35	99,78	78,74	-1,44	46,41
18	352629	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	76,21	97,06	89,22	76,83	3,97	59,93
19	040256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN	76,74	97,91	32,34	100	4,97	62,44
20	681638	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	76,9	99,22	90,86	98,64	-9,05	27,37
21	419261	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan	77,94	99,65	95,94	90,46	-3,97	40,08
22	352628	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN	78,34	96,99	96,25	96,58	-6,86	32,86
23	026118	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIMAHI	78,35	99,09	99,92	82,2	0,7	51,75
24	681595	SEKRETARIAT UTAMA	79,33	98,32	98,24	85,72	0,46	51,15
25	419280	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai	79,68	99,7	98,58	88,84	-1,23	46,93
26	419226	Badan Narkotika Nasional Kota Cillegon	80,26	99,46	99,96	92,46	-2,94	42,65
27	681621	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	80,76	97,54	21,6	100	13,38	83,46
28	689821	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR	80,86	97,61	99,47	91,79	-1,31	46,72
29	419177	Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto	81,09	97,57	99,74	88,23	1,1	52,76
30	682715	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI GORONTALO	81,12	97	98,72	85,12	3,38	58,46
31	682672	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	81,27	97,81	99,58	87,49	1,82	54,54
32	689067	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA	81,45	98,1	99,1	81,44	5,83	64,59
33	689561	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DEPOK	81,47	99,88	98,97	89,08	1,01	52,53
34	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	81,74	99,48	98,3	89,94	1,09	52,72
35	689817	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BADUNG	81,81	99,04	97,83	97,16	-3,02	42,44